

**Judul** : Pembahasan RUU Pemilu makin berkembang, muncul usulan ambang batas pembentukan fraksi

**Tanggal** : Minggu, 01 Februari 2026

**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka

**Halaman** : 2

## Pembahasan RUU Pemilu Makin Berkembang

# Muncul Usulan Ambang Batas Pembentukan Fraksi

Pro kontra ambang batas parlemen dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu di DPR terus berkembang. Kali ini ada usulan ambang batas pembentukan fraksi. Usulan itu datang dari dosen Hukum Pemilu Universitas Indonesia Titi Angraini. Menurut dia, daripada ambang batas parlemen, lebih baik ambang batas pembentukan fraksi. Titi menjelaskan, ambang batas parlemen pada prinsipnya memang bisa dipahami sebagai instrumen untuk mengurangi jumlah partai yang masuk parlemen dan mencegah fragmentasi berlebihan di parlemen. Tetapi, kata dia, dalam praktiknya di Indonesia, ambang batas ini juga selalu menimbulkan dilema

konstitusional dan demokratis.

"Pasalnya, secara langsung berimplikasi pada hilangnya suara sah memilih yang tidak terkonversi menjadi kursi atau fenomena suara terbuang," ujar Titi dalam keterangan yang diterima *Rakyat Merdeka*, Sabtu (31/1/2026).

Menurut dia, ambang batas parlemen bukan sekadar perlu atau tidak, tetapi apakah proporsional, rasional, dan benar-benar dibutuhkan dalam konteks sistem politik di Indonesia. Titi menambahkan, jika ambang batas terlalu tinggi, maka akan berpotensi menjadi mekanisme eksklusif politik yang menguntungkan partai besar dan mempersempit representasi.

"Sebaliknya, jika dihapus tanpa desain kelembagaan lain, perlu juga dipikirkan dampaknya terhadap efektivitas parlemen," tambahnya. Karena itu, lanjut dia, pengaturannya seharusnya tidak didorong oleh kompromi elit sesaat, tetapi melalui kajian terbuka. Yakni dengan berbasis data, evaluasi Pemilu sebelumnya, dan perdebatan publik yang partisipatif.

Dia menjelaskan, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 116/PUU-XI/2023, Mahkamah menegaskan bahwa ambang batas parlemen merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang, tetapi perumusannya tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang.

"MK memberi rambu bahwa besaran *threshold* harus tetap menjaga prinsip kedaulatan rakyat agar tidak terlalu banyak suara pemilih terbuang, ditetapkan secara rasional dan proporsional, serta didasarkan pada evaluasi empiris Pemilu sebelumnya," tegasnya.

Titi melanjutkan, MK juga menekankan pentingnya proses pembahasan yang terbuka dan partisipatif. Selain itu, perlunya keseimbangan antara tujuan penyederhanaan sistem kepartaian dengan keadilan representasi politik.

"Isu ambang batas parlemen selalu menjadi sorotan setiap revisi Undang-Undang Pemilu karena ambang batas menyangkut langsung kepentingan

elektoral partai politik," ungkapnya. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan, DPR akan menerima segala masukan dari seluruh pihak terkait ambang batas parlemen. Dia menambahkan, memang ada suara yang hilang ketika partai tidak lolos ambang batas parlemen.

"Namun kebanyakan fraksi di DPR akan berdampak *parlement chaos* dalam membuat berbagai keputusan bagi negara," ungkap Dede Yusuf kepada *Rakyat Merdeka*, Sabtu (31/1/2026).

Untuk mengetahui pandangan Titi Angraini dan Dede Yusuf terkait usulan ambang batas pembentukan fraksi, berikut wawancaranya.

**TITI ANGGRAINI**, Pengajar Hukum Pemilu Universitas Indonesia

## Kerja Parlemen Efisien, Suara Rakyat Terwakili



“Lebih baik, penyederhanaan fragmentasi di DPR dilakukan melalui ambang batas pembentukan fraksi daripada ambang batas parlemen.”

**Bagaimana Anda melihat polemik ambang batas parlemen?**  
Isu ambang batas bukan sekadar soal desain demokrasi, tetapi juga soal siapa yang diuntungkan dan siapa yang tersingkir dalam kompetisi politik. Maka wajar jika ambang batas selalu menjadi salah satu isu paling sensitif dan paling "diperdebatkan" dalam setiap agenda perubahan Undang-Undang Pemilu.

**Apakah yang harus diperhatikan pembuat undang-undang?**  
Pada titik ini, yang lebih penting adalah memastikan revisi Undang-Undang Pemilu tidak lagi menjadi arena transaksi aturan main, tetapi benar-

benar diarahkan untuk memperkuat representasi, keadilan suara, dan kualitas demokrasi secara keseluruhan.

**Menurut Anda, perlukah ambang batas parlemen?**  
Kalau saya sendiri berpandangan semestinya tidak perlu ambang batas parlemen untuk Pemilu DPR mendatang.

**Apakah alasannya?**  
Lebih baik, penyederhanaan sistem kepartaian dilakukan melalui metode yang tidak mengorbankan suara pemilih sehingga mereka kehilangan representasinya di parlemen karena partainya tidak lolos ambang batas nasional.

**Solusi konkretnya seperti apa?**  
Lebih baik, penyederhanaan fragmentasi di DPR dilakukan melalui ambang batas pembentukan fraksi daripada ambang batas parlemen.

**Apakah bedanya?**  
Ambang batas parlemen bekerja dengan menghapus representasi partai tertentu dan membuang suara pemilih, sementara ambang batas fraksi menjaga agar suara rakyat tetap terwakili tetapi mekanisme kerja parlemen tetap efisien. Dengan cara ini, penyederhanaan dilakukan pada level pengorganisasian DPR, bukan dengan mengorbankan hak representasi politik warga negara. ■ **NNM**

**DEDE YUSUF MACAN EFFENDI**, Wakil Ketua Komisi II DPR

## Kami Masih Mengkaji, Terbuka Semua Opsi



“Perlu juga ada solusi syarat pembentukan fraksi di DPR nanti. Intinya kami masih mengkaji, bahkan mengundang berbagai akademisi dan praktisi utk memberikan masukan ke komisi.”

**Bagaimana Anda melihat usulan ambang batas pembentukan fraksi?**  
Kami membuka semua opsi untuk diskusikan nanti ya.

**Isu ambang batas dikaitkan dengan hilangnya suara pemilih karena tidak lolos ambang batas. Anda melihatnya seperti apa?**  
Memang hilangnya suara akibat tidak masuk ambang batas parlemen benar adanya. Namun, menurut saya, kebanyakan fraksi di DPR nanti juga akan berdampak ke depannya.

**Apakah dampak ke depannya?**

Seperti terjadi *parlement chaos* dalam membuat berbagai keputusan bagi negara.

**Menurut Anda sendiri, ambang batas parlemen masih diperlukan ya?**  
Intinya sama dengan di berbagai negara, ambang batas parlemen juga tetap harus ada.

**Besarannya berapa persen?**  
Tentu perlu disimulasikan berapa persen yang terbaik tapi tidak menyebabkan banyaknya suara rakyat yang terbuang. Semangat ini yang dimandatkan MK juga.

**Kalau terkait usulan ambang batas pembentukan fraksi ini bagaimana?**

Perlu juga ada solusi syarat pembentukan fraksi di DPR nanti. Intinya kami masih mengkaji, bahkan mengundang berbagai akademisi dan praktisi utk memberikan masukan ke komisi.

**Artinya masih sangat terbuka ya pembahasan mengenai ambang batas parlemen ya?**  
Iya, nanti semua masukan akan kita bahas bersama Pemerintah dalam panitia kerja (Panja). ■ **NNM**